

Kepemimpinan Jawa Arek di Desa Hularejo Dalam Perspektif Kewirausahaan Politik

Bayu Sadewa¹, Wawan Sobari², Muhtar Haboddin³

^{1,2,3} Program Studi Magister Ilmu Sosial, Universitas Brawijaya Malang

Abstract. This causality case study research aims to explore how political entrepreneurship practices by considering cultural variables in carrying out strategies as a political entrepreneur, a study that has not been widely discussed in academic research. According to Petridou (2016), political entrepreneurship is divided into four main aspects Who, How, Where and Impact. Different from the theory used, this research seeks to explain the how aspect from a cultural perspective. Two important indicators contained in the how aspect are the interaction between actors and the strategy of a political entrepreneur which will be elaborated with Jawa Arek culture. Jawa Arek culture, which is known for its blak-blakan and bondho nekat character, will color the leadership of the Hularejo Village Head who is the main subject of the research. This research shows that the Jawa Arek philosophy implemented in the village head's political entrepreneurship strategy is able to become a solution related to various problems that exist in society, this is based on a fluid communication pattern and is able to accommodate the interests of the community. The results of this research also show that entrepreneurial practice also contains two main branches of political entrepreneurship, namely political economy in terms of resource reallocation and policy change. The phenomenon of pandemic BLTDD distribution supports Petridou's (2016) statement regarding the rewards of several types of political benefits in the resource reallocation process.

Keywords: Leadership; Jawa Arek; Political Entrepreneurship.

Abstrak. Penelitian studi kasus kausalitas ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana praktik kewirausahaan politik dengan mempertimbangkan variabel kebudayaan dalam menjalankan strategi sebagai seorang usahawan politik dimana studi ini belum banyak didiskusikan dalam riset akademis. Kewirausahaan politik menurut pandangan Petridou (2016) dibagi menjadi empat aspek utama, yakni Who, How, Where dan Impact. Berbeda dengan teori yang digunakan, penelitian ini berusaha untuk menjelaskan aspek how dari sisi kebudayaan. Dua indikator penting yang dimuat dari aspek how adalah interaksi antar aktor dan strategi seorang usahawan politik akan dielaborasi dengan kebudayaan Jawa Arek. Kebudayaan Jawa Arek yang dikenal dengan karakter lugas, blak-blakan, hingga bondho nekat akan mewarnai terhadap bagaimana kepemimpinan Kepala Desa Hularejo yang menjadi subjek penelitian. Penelitian ini menunjukkan bahwa filosofi Jawa Arek yang diimplementasikan dalam strategi kewirausahaan politik kepala desa mampu untuk menjadi solusi terkait dengan berbagai permasalahan yang ada di masyarakat, hal ini didasarkan pada pola komunikasi yang cair dan mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa dalam praktik kewirausahaan ini juga mengandung dua cabang utama kewirausahaan politik yakni ekonomi politik dalam hal relokasi sumber daya dan perubahan kebijakan. Fenomena penyaluran BLTDD pandemi mendukung pernyataan Petridou (2016) tentang imbalan beberapa jenis keuntungan politik dalam proses relokasi sumber daya.

Kata Kunci: Kepemimpinan; Jawa Arek; Kewirausahaan Politik.

Received: 29/11/2023

Revised: 29/03/2024

Accepted: 29/03/2024

Korespondensi:

Program Studi Magister Ilmu Sosial, FISIP,
Universitas Brawijaya
Gedung C FISIP, Ketawanggede, Lowokwaru,
Kota Malang, Jawa Timur, 65145
Email: bayusadewa250@student.ub.ac.id

PENDAHULUAN

Mayoritas penduduk Jawa Timur merupakan suku Jawa yang heterogen, disertai dengan suku madura yang berada di pulau madura dan wilayah tapal kuda. Secara kultural Jawa Timur memiliki sepuluh wilayah peta kebudayaan, Lima subkultur kebudayaan besar yang ada di Jawa Timur didominasi oleh Jawa Mataraman, Arek, Madura, Osing dan Pandalungan (Leni 2012). Dalam subkultur budaya jawa yang menjadi titik fokus penelitian ini adalah tlatah budaya Jawa Arek yang merupakan kebudayaan yang cukup dikenal dengan ciri khas Jawa Timurnya. Masyarakat dalam subkultur kebudayaan ini dikenal dengan semangat juang yang tinggi, blak-blakan, kesetiaan, rasional, dan mudah beradaptasi. Selain itu ciri khas lain yang tidak dapat dipisahkan dari subkultur kebudayaan ini adalah bondho nekat (Abdillah 2017). Secara kultural pusat dominasi kebudayaan Jawa Arek berada di wilayah Surabaya, Malang Raya dan daerah penyangganya. Akulturasi budaya yang bercampur dari beberapa segmen merupakan konsekuensi dari terbukanya Kota Surabaya dan Malang Raya terhadap pendatang.

William H. Frederick menjelaskan bahwa wilayah Surabaya dan Malang Raya menjadi melting pot dari berbagai varian budaya yang datang untuk berbagai tujuan hingga menciptakan budaya baru yang unik (Ansori 2015). Budaya arek juga memiliki karakteristik apa adanya dan lugas, karakter seperti ini diartikan sebagai sikap yang tidak mau menyembunyikan sesuatu, terlebih lagi menyembunyikan kesalahan. Masyarakat seringkali mengutarakan sesuatu walaupun terkadang melukai perasaan orang lain. Karakter ini juga tercermin dalam tutur kata masyarakat dalam lingkungan budaya arek yang seringkali ceplas-ceplos dan to the poin ketika menghendaki atau meminta sesuatu kepada pihak lain.

Identitas seorang pemimpin politik akan mewarnai bagaimana praktik kewirausahaan politik yang dijalankan, sehingga persamaan antara budaya yang dimiliki oleh pemimpin dengan orang yang dimiliki berperan strategis. Ketika identitas tersebut berbeda dan berada di tempat yang salah akan muncul egoisme. Pimpinan politik akan memanifestasi identitas dan kebiasaan-kebiasaan yang dimiliki dalam program kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan (Chalik, 2015).

Dengan karakteristik budaya arek yang terbuka, ekspresif, kesetaraan, mudah beradaptasi dengan lingkungan dan tanpa tedheng aling-aling yang secara otomatis dimiliki juga oleh Kepala Desa Hularejo sebagai pemimpin yang notabene merupakan warga lokal dengan budaya jawa arek yang melekat. Pemilihan Desa Hularejo sendiri didasari atas beberapa alasan utama, diantaranya adalah ciri khas kepemimpinan Bapak Joko (nama samaran) yang nyentrik, alasan lain juga berdasar pada pembangunan pariwisata yang berbasis kearifan lokal, hingga pengukuhan desa dengan kerukunan antar kelompok beragama (Radar Malang, 2021). Selain itu Hularejo juga didaulat sebagai salah satu desa mandiri yang ada di Kota X.

Pemilihan Joko sebagai subjek utama penelitian juga tidak terlepas dari bagaimana karakter beliau yang berani untuk bersikap. Joko seringkali melakukan proses pengambilan keputusan yang sangat berani, seperti keberanian untuk menantang pimpinan di daerah, hingga bagaimana upaya beliau untuk menjadi abdi bagi masyarakat dengan kegiatan sosial yang membuatnya diberi julukan oleh masyarakat setempat dengan nama Joko Beres (Ex. Kasi Pemerintahan Kecamatan X, Komunikasi Pribadi, Februari 2023). Beres yang berarti bagaimana seorang kepala desa yang mampu memberikan solusi atas kebutuhan masyarakat baik di ranah privat maupun publik. Konsepsi Budaya Jawa Arek yang sedemikian rupa disadari atau tanpa disadari bermanifestasi menjadi kewirausahaan politik guna menemukan solusi dan proses penciptaan kebijakan yang tepat dan berguna bagi masyarakat.

Kepemimpinan politik yang dijalankan oleh Joko Beres sebagai kepala desa akan berdampak kepada bagaimana implementasi kewirausahaan politik yang dijalankan. Pada dasarnya tujuan utama dari implementasi kewirausahaan politik adalah untuk merubah tatanan birokrasi hingga penciptaan kebijakan yang inovatif (Petridou et al., 2016). Lebih lanjut Petridou menjelaskan bahwa dalam literature kewirausahaan politik terdapat beberapa indikator utama untuk menganalisis bagaimana seorang pemimpin politik menjalankan roda pemerintahan. Beberapa indikator yang disebutkan diatas meliputi who, how, where, dan impact (Petridou et al., 2016). Item who berfokus untuk menjelaskan sebagai apa peran usahawan politik. Selanjutnya untuk item how berfokus kepada bagaimana interaksi antar aktor dijalankan, hingga bagaimana strategi seorang usahawan politik. Berbeda dengan

kedua item yang telah dijelaskan diatas, item where berusaha untuk menjelaskan kewirausahaan politik dari sisi level pemerintahan, level kebijakan hingga kondisi geografi.

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan oleh Petridou dalam membongkar teori kewirausahaan politik, penelitian ini berusaha untuk menganalisa bagaimana kinerja dalam kepemimpinan politik kepala desa yang berbasis karakteristik jawa arek. Dengan demikian penelitian ini akan menggunakan item How sesuai dengan pemetaan literature kewirausahaan politik yang berfokus pada bagaimana interaksi antar aktor yang bekerja dan bagaimana strategi seorang usahawan politik.

Ditinjau dari fenomena kepemimpinan dan karakteristik jawa arek yang dimiliki oleh kepala desa akan menghasilkan strategi dalam menjalankan kewirausahaan politik yang unik. Dari sisi akademis penelitian dan elaborasi terkait dengan kewirausahaan politik dan kebudayaan telah dilaksanakan. Hasil Penelitian dari Sobari (2019) menjelaskan interaksi antar pemimpin dan masyarakat membuat praktik kewirausahaan politik dapat diterima dan mendapatkan tanggapan positif (Sobari, 2019). Selain itu filosofi budaya jawa yang dianut oleh kepala desa juga menjadi faktor pembeda dalam bekerjanya kewirausahaan politik. Nilai-nilai dan filosofi kepemimpinan jawa mendorong penerimaan masyarakat terhadap praktik kewirausahaan politik kepala desa.

Dewasa ini, riset tentang kewirausahaan politik lebih banyak berfokus kepada bagaimana menganalisa praktik kewirausahaan politik berjalan beriringan dengan inovasi-inovasi yang diciptakan. Sigurdarson (2021) berusaha untuk mengeksplorasi bagaimana praktik kewirausahaan politik pada partai politik di Islandia untuk keluar dari tatanan-tenanan tradisional guna menciptakan suatu program partai politik yang lebih inovatif yang akan diterapkan pada kader partai yang ada pada parlemen (Sigurdarson, 2021).

Petridou sebagai pakar dari kewirausahaan politik juga mengemukakan riset tentang bagaimana menciptakan jejaring untuk mengangkat suatu isu menjadi agenda politik (Petridou et al., 2021). Pada riset juga dijelaskan bagaimana kunci utama dalam praktik kewirausahaan politik adalah interaksi dan kredibilitas dari seorang usahawan. Selain tergantung pada motivasi atau political will dari seorang

usahawan politik, pada penelitian ini juga membenarkan bahwa kedekatan dengan pemimpin politik terpilih memiliki pengaruh besar terhadap agenda kebijakan. Istilah tersebut dalam falsafah politik Jawa seringkali disebut dengan *Nyenggek* seperti yang dikemukakan oleh Sobari dalam penelitiannya.

Penggunaan item *how* pada penelitian yang dilaksanakan oleh Petridou diatas menggambarkan bahwa interaksi dan bagaimana strategi seorang usahawan politik memiliki peran yang krusial dalam penentuan agenda kebijakan. Dengan demikian menganalisa item *how* yang mengelaborasi dengan karakteristik kebudayaan akan menampilkan sebuah pandangan baru dalam pelaksanaan kewirausahaan politik ditingkat lokal.

Kembali pada eksplorasi yang dilakukan oleh Sobari (2019), penelitian ini berupaya untuk memberikan gagasan baru. Tidak hanya elaborasi antara praktik kewirausahaan politik dengan subkultur kebudayaan yang dianalisa, riset ini berupaya untuk memberikan gagasan baru dalam bentuk strategi dalam menjalankan kewirausahaan politik yang didasari dengan instrument kebudayaan. Sehingga subkultur kebudayaan yang menjadi latar belakang pemimpin politik akan memberikan nuansa baru dan memberikan nilai positif dan implikasi terhadap kewirausahaan politik (Sobari, 2019).

Ditingkat lokal, penyelarasan atau hubungan antara kepemimpinan politik dengan kebudayaan adalah masalah urgent yang seringkali menjadi *missing link* dalam sebuah penelitian mengenai kepemimpinan dan kewirausahaan politik. Sesuai dengan pandangan Backer terkait dengan budaya dan identitas, pimpinan politik akan membawa identitas masing-masing (Chalik, 2015). Ketika identitas tersebut berbeda dan berada di tempat yang salah akan muncul *egoisme*. Dengan demikian, penelitian ini akan menjadi sebuah riset ideal dengan kesamaan budaya yang dimiliki oleh pemimpin dengan masyarakat. Sehingga hasil penelitian dapat menjadi sebuah acuan, apakah persamaan budaya yang dimiliki dapat mewarnai praktik kewirausahaan politik secara positif atau sebaliknya. Pada akhirnya, tulisan ini memperluas kewirausahaan politik dari aspek *how* dengan mempertimbangkan kontribusi budaya dalam strategi menjalankan kewirausahaan politik dimana studi ini belum banyak didiskusikan dalam riset akademis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berfokus kepada bagaimana kontribusi kepemimpinan politik Jawa Arek terhadap implementasi kewirausahaan politik yang dijalankan di Desa Hulurejo, Kecamatan X, Kota X pada bulan Desember 2022 sampai dengan Oktober 2023. Nama lokasi dan subjek penelitian merupakan nama samaran yang berguna untuk melindungi privasi informan. Sebagai seorang pejabat politik ditingkat lokal, penulis juga beranggapan bahwa menyamarkan nama informan bertujuan untuk menjaga hak-hak, kepentingan, hingga sensitivitas yang timbul akibat dari penelitian ini.

Pendekatan kualitatif digunakan sebagai acuan untuk menelusuri cara berpikir kontribusi kepemimpinan politik Jawa Arek dalam implementasi kewirausahaan politik ditingkat lokal. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, data primer diperoleh dari wawancara dengan subjek-subjek yang dianggap kompeten sesuai dengan topik penelitian yang dipilih. Selain wawancara juga dilaksanakan observasi untuk mengetahui bagaimana kondisi dilapangan terkait dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh kepala desa. Selanjutnya adalah data sekunder, data sekunder diperoleh dari studi literature yang dilakukan meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen resmi pemerintah yang sesuai dengan topik penelitian, hingga penelitian-penelitian terdahulu yang dapat memperkaya studi tentang kewirausahaan politik ini.

Studi kasus tunggal digunakan dalam penelitian ini guna memahami realita secara komperhensif dan mendalam. Studi kasus tunggal berusaha untuk menyelami satu fenomena besar beserta fenomena pendukung dibaliknya sehingga mewarnai fenomena besar utama. Sehingga terdapat varibel lain yang mampu untuk mewarnai, dalam penelitian ini varibael budaya dan kebiasaan masyarakat lokal mampu untuk memberikan warna tersendiri pada implementasi kewirausahaan politik di Desa Hulurejo. Untuk mendapatkan hasil yang ideal dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk memulai dari kasus yang telah teridentifikasi dengan menggunakan studi kasus intrinsik (Stake, 1994).

Pemilihan Desa Hulurejo sendiri didasarkan kepada kepemimpinan unik yang dijalankan oleh kepala desa, implementasi kepemimpinan politik Jawa Arek hingga

prestasi-prestasi yang diraih selama kepemimpinan kepala desa. Prestasi yang dimiliki oleh Joko ketika menjabat sebagai kepala desa antara lain perkembangan eco wisata yang semakin pesat, kegiatan pelestarian budaya seringkali dilaksanakan, hingga pemberdayaan masyarakat yang massif dilakukan. Desa Hulurejo juga dinobatkan sebagai Desa Kerukunan Antar Umat Bergama (KKUB) yang membuktikan toleransi antar umat beragama mampu dijalankan pada saat kepemimpinan Joko. Dari sisi karakteristik individu dalam kepemimpinannya Joko merupakan salah satu kepala desa yang menerapkan kepemimpinan politik Jawa Arek. Karakteristik seperti manjing ajur-ajer, bloko sutho, blak-blakan hingga bondho nekat menjadi ciri khas ketika Joko menahkodai Desa Hulurejo yang berjalan dua periode ini. Penjelasan diatas meyakinkan peneliti untuk meneliti bagaimana kontribusi dari filosofi kepemimpinan Jawa Arek terhadap kewirausahaan politik yang ada di tingkat lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Filosofi Kepemimpinan Politik Jawa Arek Di Desa Hulurejo Guna Mendukung Kewirausahaan Politik

Sesuai dengan muatan peta literatur kewirausahaan politik menurut Petridou, pada tahap How atau bagaimana seorang aktor pengusaha politik menjalankan atau mengimplementasikan kewirausahaan politik terdapat dua indikator yang mempengaruhi. Dua indikator yang tertera adalah bagaimana strategi seorang pengusaha politik untuk menjalankan kegiatannya serta bagaimana pola komunikasi yang dibangun dengan aktor yang berhubungan (Petridou, Aflaki, and Miles 2015). Pada poin ini peneliti akan membahas dan fokus kepada bagaimana pola komunikasi yang dilaksanakan dengan masyarakat. Dalam menjalankan komunikasi dengan masyarakat, seorang kepala desa atau pimpinan politik lain harus bersikap kompromi. Kompromi ini dimaksudkan bahwa kepala desa diharuskan untuk memiliki kemampuan menerjemahkan apa program dan kegiatan yang diinginkan oleh masyarakat, bukan praktik ideal menurut pemerintah desa. Sehingga sebaik atau sebagus apapun kebijakan yang dicipatakan apabila tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat tidak akan memiliki kemanfaatan publik. Seperti yang dijelaskan oleh Kepala Desa Hulurejo sebagai berikut:

“Saya selalu berkomunikasi dengan masyarakat, keinginannya seperti apa, sehingga tepat sasaran. Jadi saya selalu berdiskusi entah itu formal atau tidak, sehingga maksud dan tujuan saya dan keinginan dari mereka itu tetap tercapai dan tidak mubadzir.” (Wawancara, Kepala Desa Hulurejo, Desember 2022)

Tanggapan dari kepala desa diatas menjelaskan bahwa dalam praktik ideal kewirausahaan politik harus mengesampingkan ego masing-masing. Proses komunikasi dengan banyak aktor, terutama dengan masyarakat yang berperan sebagai penerima manfaat akan mengubah ide yang dianggap cemerlang oleh pengusaha politik menjadi lebih humanis dan bermanfaat. Kondisi dan latar belakang masyarakat desa yang plural dan beragam menjadikan pola komunikasi menjadi starting point sebagai langkah awal dalam menjalankan proses kewirausahaan politik. Lebih lanjut berikut adalah penjelasan dari Kades Joko:

“Saya mewajibkan diri saya untuk bertemu dan dialog dengan masyarakat terkait dengan keluhan kesah mereka, kebutuhan mereka apa, dan apa yang bisa kita berikan. Kalau kita menunggu rangkaian musrenbang yang kasian masyarakat.” (Wawancara, Kepala Desa Hulurejo, Desember 2022)

Proses wawancara dengan kepala desa diatas menjadi salah satu bukti bagaimana ciri khas sub kultur kebudayaan Jawa Arek bekerja dengan baik untuk mendukung bagaimana implementasi kewirausahaan politik. Penjelasan diatas membuktikan bahwa ciri mudah beradaptasi atau Manjing Ajur-Ajer merupakan identitas yang tidak bisa ditinggalkan oleh seorang pemimpin.

Pola komunikasi yang dibangun dengan cara apapun baik informal maupun formal diharapkan mampu sebagai standing point ataupun pijakan sebagai proses formulasi kebijakan yang berkualitas. Keterangan lain juga diberikan oleh Sekretaris Desa yang mengungkapkan bagaimana humble dan egaliternya Kepala Desa Hulurejo. Berikut adalah keterangan yang diberikan oleh Sekretaris Desa Hulurejo:

“Bapak ini orangnya sederhana dan mudah berbaur, pagi berangkat selalu menuju semua dusun yang ada di Desa Hulurejo dulu. Bahkan ketika bertemu warga saat berangkat ke kantor beliau selalu menyempatkan untuk mendengarkan keluhan kesah hingga saran untuk pemdes”. (Wawancara, Sekretaris Desa Hulurejo, Desember 2022)

Kondisi seorang pemimpin yang dekat dan dianggap sebagai wakil rakyat mempermudah berbagai urusan dan proses perencanaan. Hal lain yang dianggap

unik adalah kepala desa tidak ingin dianggap sebagai seorang pemimpin atau atasan, beliau menggap dan memosisikan diri sebagai pelayan masyarakat. Alhasil kondisi sedemikian rupa menjadikan nilai egaliter semakin terasa ketika menganalisis bagaimana kepemimpinan Kepala Desa Hulurejo.

“Jadi dulu mas saat periode pertama Pak Joko menjabat, itu masyarakat seringkali meminta bantuan yang beraneka ragam. Misalnya kalau ada orang sakit, Pak Joko mengantar, orang meninggal, hajatan, dan permasalahan lain yang sepertinya sepele”. (Wawancara, Kepala Dusun Junggo, Januari 2023)

Kondisi sedemikian rupa yang mengarah kepada kewirausahaan politik produktif juga menimbulkan dampak penemuan peluang yang memiliki keuntungan potensial (Shockley, Frank, & Stough, 2002). Pandangan dari Shockley berbanding lurus dengan proses implementasi kewirausahaan politik ditinjau dari sisi komunikasi. Bukan menjadi rahasia umum bahwa jabatan politik seperti kepala desa memang membutuhkan perlakuan khusus guna mengawetkan jabatan dan kredit politik. Sehingga peran sebagai abdi sosial menjadikan potensi terpilihnya kembali seorang kepala desa menjadi terbuka lebar. Maka dari itu selain perubahan tatanan pada birokrasi atau penciptaan inovasi baru, konsep kewirausahaan politik juga memiliki pengaruh besar pada elektoral. Dimana petahana selalu diuntungkan dengan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada masa kepemimpinannya.

Sikap dan karakteristik yang ditampilkan oleh kepala desa menciptakan julukan baru yang disematkan, yakni “Joko Beres”. Panggilan tersebut berawal dari asal mula Joko yang berprofesi sebagai seorang makelar tanah. Saat berprofesi sebagai makelar tanah Joko sering mengatakan kata “beres” ketika terdapat seorang yang ingin meminta bantuan membeli atau menjual tanah. Hal tersebut berbanding lurus dengan pernyataan Kasi Pemerintahan Desa Hulurejo yang menjelaskan sebagai berikut:

“Jadi Pak Kades dulu itu makelar mas, kalo ada orang yang minta tolong untuk jual beli tanah beliau selalu bilang beres mas. Pada akhirnya ketika mencalonkan diri sebagai kepala desa slogan “beres” ini digunakan oleh lawan politik guna menjatuhkan Pak Kades.” (Wawancara, Kepala Seksi Pemerintahan Desa Hulurejo, Desember 2022)

Penjelasan diatas menjelaskan bahwa tagline beres merupakan alat untuk menyerang Joko ketika mencalonkan diri sebagai kepala desa. Beres disini

berkonotasi negatif dari seorang makelar tanah yang dianggap sebagai profesii “nakal” oleh sebagian orang. Seorang makelar tanah seringkali mengambil keuntungan yang tidak wajar, sehingga lawan politik berusaha untuk menggiring opini publik bahwasanya seorang makelar tanah ketika memiliki jabatan akan menyelewengkan jabatan tersebut dengan konotasi negatif yang telah dijelaskan diatas.

Adaptasi lain dari peran sebagai abdi sosial juga tercermin dari budaya cangkrukan. Cangkrukan merupakan budaya ngobrol yang dilaksanakan di warung kopi atau tempat lain, dilaksanakan untuk membahas atau memperbincangkan sesuatu beramai-ramai. kondisi dan fenomena cangkrukan ini timbul akibat dari sikap sungkan masyarakat untuk menyampaikan pendapat pada saat forum formal. Harmonisasi dan cara *ngemong* Kades Joko menunjukkan perbedaan karakteristik kepemimpinan antar sub kultur kebudayaan. Salah satu kepemimpinan Jawa Arek yang terlihat dalam bagaimana pola komunikasi yang dibangun, pemimpin-pemimpin pada umumnya memiliki sikap ingin dihargai atau terkesan arogan. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya gap atau jarak dengan masyarakat. Sehingga prosesi dan implementasi kewirausahaan politik seringkali tidak berjalan dengan baik atau bahkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat.

Pendekatan yang digunakan oleh kepala desa juga berdampak bagaimana kerukunan antar umat beragama terjalin di Desa Hulurejo. Desa Hulurejo dikenal dengan kondisi yang plural, terdapat beberapa agama yang mendiami wilayah desa tersebut diantaranya islam, kristen, hindu, hingga budha. Desa Hulurejo juga menjadi satu-satu desa di Kota X dengan penduduk beragama hindu terbesar, hal ini dikarenakan migrasi dan peperangan yang terjadi pada masa Kerajaan Majapahit (Times Malang 2022). Pluralisme di Desa Hulurejo dapat dikendalikan oleh kepala desa untuk menciptakan kondisi adem ayem tanpa perseteruan, saling menghargai menciptakan budaya toleran yang jarang ditemui di daerah lain. Berdasarkan hal tersebut diatas Desa Hulurejo dijadikan percontohan dan dikukuhkan sebagai Desa Sadar Kerukunan Umat Beragama.

Selain dikenal dengan pemberian dukungan moril kepada seluruh umat beragama, dukungan lain yang diberikan juga berupa fasilitas untuk melaksanakan

ibadah. Tercatat bahwa setiap umat beragama memiliki tempat ibadah yang layak digunakan. Salah satu tempat ibadah yang menonjol di Desa Hulurejo adalah Pura Giri Arjuna yang seringkali digunakan oleh umat agama hindu dari penjuru nusantara untuk beribadah. Kades Joko memiliki maksud dan tujuan lain yang juga berhubungan dengan kewirausahaan politik. Pembangunan fasilitas Pura Giri Arjuna diasumsikan akan meningkatkan pengunjung dari penjuru nusantara untuk beribadah. Sehingga hal ini akan berdampak kepada kunjungan pariwisata atau fasilitas penunjang pariwisata lain untuk peningkatan ekonomi lokal. Home stay kelas menengah juga akan ramai, pusat oleh-oleh khas Desa Hulurejo juga akan mengalami peningkatan. Serta menciptakan lapangan pekerjaan baru dibidang transportasi untuk penjemputan tamu dari penginapan menuju pura.

Strategi Kepemimpinan Kepala Desa Hulurejo Dalam Menjalankan Program Pemerintah Desa

Joko merupakan salah satu tokoh atau sesepuh dengan pengalaman yang luar biasa sebelum memimpin Desa Hulurejo. Latar belakang Joko yang merupakan masyarakat lokal Kota X menjadikannya sebagai masyarakat Jawa Arek asli. Budaya yang identik antara pengusaha politik dan masyarakat yang dipimpin akan menciptakan harmonisasi dalam proses formulasi kebijakan, sehingga tidak terjadi egoisme dalam proses formulasi kebijakan. Pelaksanaan strategi dalam menjalankan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Joko merupakan manifestasi dari karakteristik kebudayaan Jawa Arek. Sikap blak-blakan, bondho nekat, hingga sikap yang terkesan keras dalam kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku mencerminkan bagaimana implementasi filosofi subkultur kebudayaan Jawa Arek yang mewarnai berjalannya kewirausahaan politik.

Contoh daripada sikap blak-blakan terletak pada ketika kepala desa menolak titipan perangkat desa yang dibawa oleh pejabat tinggi pemerintah daerah pada waktu itu. Kepala desa dengan tegas tidak ingin merusak harmonisasi yang telah beliau bangun dengan orang-orang dan perangkat lama yang kompak dan kondusif. Fenomena ini juga membuktikan bahwa kepala desa Joko tidak memiliki kepentingan dengan pejabat-pejabat di lingkungan pemerintah daerah, sehingga beliau bebas untuk mengatur struktur birokrasi di Desa Hulurejo sesuai dengan apa yang

dikehendaki. Mantan Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan X yang pada saat itu mengetahui bagaimana fenomena ini terjadi menjelaskan:

“Jadi waktu itu ada salah satu pejabat pemerintah daerah berusaha untuk menitipkan sanak saudaranya sebagai perangkat desa di Desa Hulurejo. Pada saat itu juga kebetulan ada rekrutmen perangkat, tetapi pada saat itu Kepala Desa Hulurejo menegaskan dengan jelas bahwa beliau tidak berkehendak untuk merealisasikan hal itu. Kalau beliau menyatakan bahwa tidak ingin merusak struktur dan harmonisasi yang ia buat dengan menyelundupkan titipan pejabat pemerintah daerah. Ya seperti yang saya jelaskan tadi bahwa beliau tidak punya kepentingan di tingkat pemda, sehingga penolakan-penolakan tersebut dianggap mudah. Berbeda dengan seorang kepala desa yang memiliki kepentingan terhadap pejabat-pejabat pemerintah daerah.” (Wawancara, Ex. Kasi Pemerintahan Kecamatan X 2019, Februari 2023)

Sikap-sikap yang digambarkan oleh kepala desa Joko menjadikan beliau bebas untuk mengatur struktur birokrasinya sesuai yang dikehendaki, atau kepala desa yang benar-benar otonom secara otoritas. Kompromi dan politik balas budi tidak berlaku disini. Selain sikap blak-blakan yang dimiliki oleh Joko yang dilakukan kepada pemerintah daerah, Joko memiliki kemampuan lain untuk mendapatkan program dan kegiatan dari pemerintah daerah yang biasa disebut dengan *Nyenggek* (akses dana, program dan kegiatan). Proses *Nyenggek* yang dilakukan oleh Kades Joko yang didasari oleh peluang karena pemerintah daerah juga membutuhkan kegiatan. Anggaran yang telah direncanakan pada tahun sebelumnya akan lebih baik diberikan kepada pemerintah desa daripada tidak terserap dan berpengaruh terhadap penganggaran keuangan tahun depan. *Nyenggek* menciptakan hubungan simbiosis mutualisme dimana pemerintah daerah dan desa sama-sama mendapatkan keuntungan atas apa yang mereka kerjakan bersama.

Dengan berjalannya ecotorurism Desa Hulurejo yang terkenal sebagai jujukan wisatawan baik lokal maupun mancanegara, terdapat kebijakan unik yang berguna untuk pemberdayaan ekonomi lokal masyarakat. Kepala desa Hulurejo melarang pendirian toko modern di Desa Hulurejo (Malang Times 2019). Kepala desa berasumsi bahwa pendirian toko modern di wilayah desa akan menghambat pemberdayaan ekonomi lokal masyarakat. Dengan modal yang tidak terhingga mereka dengan mudah memonopoli perdagangan baik toko kelontong, pusat oleh-oleh hingga merchandise khas Kota X yang dikelola dengan modern dan professional. Maka dari

itu dengan potensi Desa Hulurejo sebagai salah satu jujukan wisatawan menjadikan peluang tersendiri, sehingga pusat oleh-oleh umkm, toko kelontong umkm, hingga jasa biro perjalanan umkm juga menjadi trensetter di Desa Hulurejo hingga saat ini.

Untuk pelaksanaan pariwisata berbasis alam sendiri, Desa Hulurejo juga menjadi salah satu icon di Kota X. Pada tahun 2021 silam, Kota X dihebohkan dengan rencana pembangunan wisata Bon Desa yang diinisiasi oleh Pemerintah Desa Hulurejo. Tempat wisata yang akan segera menjadi icon dari Desa Hulurejo ini merupakan tempat wisata terintegrasi dengan mengandalkan potensi desa yakni pertanian yang akan mengintegrasikan wisata petik buah apel maupun sayur, resto yang mengedepankan makanan tradisional khas Desa Hulurejo, hingga toko cinderamata yang isinya berasal dari umkm yang ada di Desa Hulurejo.

Dengan pembiayaan lintas sektoral memungkinkan untuk memberikan fasilitas dan kebijakan yang lebih baik dibanding dengan pembiayaan yang murni dibebankan kepada pemerintah desa. Pembiayaan lintas sektoral memungkinkan untuk terjadinya check and balance, sehingga keberlangsungan dan keberlanjutan daripada wisata ini lebih terjamin daripada sistem tunggal yang dilaksanakan dalam pembangunannya. Aksi Nyenggek yang seringkali dilakukan oleh Joko juga mengundang Pemerintah Kota X yang diwakili oleh Dinas Lingkungan Hidup juga turut andil untuk revitalisasi wisata bon desa. Dengan potensi pertanian dan ruang terbuka hijau yang dimiliki oleh wisata ini, diamanatkan wisata bon desa mampu untuk menjadi alun-alun kedua Kota Wisata X. Aspek yang menjadi daya tarik Dinas Lingkungan Hidup Kota X untuk menyokong eksistensi bon desa ini ditinjau dari sisi campaign yang dilakukan Joko terkait dengan konservasi sumber daya alam yang ada di Kota X.

Gayanya yang apa adanya, ceplas-ceplos, bondho nekat dinilai secara efektif mampu untuk menjadi figur pelaksanaan kewirausahaan politik yang ada di Hulurejo. Tanpa mengesampingkan aspek lain yang mempengaruhi bagaimana cara kerja dari kewirausahaan politik, pola komunikasi dan hubungan antar aktor yang timbul antara pemerintah desa dan pemerintah daerah menjadi poin utama dalam proses dan hasil yang dinamakan Nyenggek tersebut.

Salah satu fenomena yang menjelaskan bagaimana karakteristik Bondho Nekat adalah pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) pada tahun 2019 pada awal pandemi Covid-19. Pada waktu itu tidak ada regulasi yang jelas dari pemerintah daerah, sehingga 19 desa di Kota X tidak/belum dapat untuk menyalurkan BLTDD kepada masyarakat desa. Hal ini menciptakan situasi yang membingungkan bagi seluruh kepala desa, mengingat bahwa kondisi masyarakat desa yang membutuhkan bantuan ditengah berbagai mata pencaharian yang macet dampak pandemi Covid-19. Joko menjelaskan:

“Saya dilema pada saat itu, kondisi pandemi, masyarakat sudah bingung karena berbagai mata pencaharian juga mati total. Disini kan banyak warga masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor pariwisata. Pandemi ini berdampak kepada penghasilan mereka, kalau tidak ada wisatawan berkunjung mereka mau makan apa? Saya ke Kecamatan, ke Dinas Sosial tidak ada kejelasan, jawabannya hanya nunggu regulasi dan pimpinan.” (Wawancara, Ex. Kasi Pemerintahan Kecamatan X 2019 yang mendemonstrasikan perkataan Joko, Februari 2023)

Berdasarkan penjelasan Joko diatas menjelaskan bahwa beliau seringkali bersebrangan dengan kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah kota. Karakteristik Bondho Nekat dalam menyampaikan pendapat yang bersebrangan dengan pemerintah kota merupakan nyali dan keberanian dari sosok pemimpin yang tidak dimiliki oleh semua orang. Joko terus menyangkal argumen dari pemerintah daerah dengan dalih kepala desalah yang mengerti bagaimana kondisi masyarakat dibawah. Sehingga progresi formulasi kebijakan dengan menggunakan skema Top Down tidak akan berdampak baik dikalangan masyarakat desa ditengah pandemic Covid-19.

Kontribusi Filosofi Kepemimpinan Politik Jawa Arek Terhadap Strategi Kepemimpinan Kepala Desa Hulurejo dalam Menjalankan Program Dan Kegiatan Desa

Bagi pemerintahan desa yang merupakan level governance paling rendah dan bersinggungan langsung dengan masyarakat, maka proses kewirausahaan politik dari kepala desa menjadi standing point dalam strategi perencanaan program dan kegiatan. Kepala desa yang menjadi pemimpin politik tertinggi ditingkat desa dituntut untuk menyesuaikan diri dengan kondisi budaya dan kebiasaan masyarakat

lokal. Maka dari itu kepala desa harus mengimplementasikan ciri dan karakteristik sub kultur kebudayaan Jawa Arek untuk menerapkan strategi yang sesuai.

Praktik ideal yang diamanatkan oleh sub kultur kebudayaan Jawa Arek adalah sikap mudah beradaptasi, blak-blakan, hingga bondho nekat. Beberapa karakteristik yang telah disebutkan diatas mewarnai bagaimana penentuan strategi dalam menjalankan roda pemerintahan. Dalam karakteristik mudah beradaptasi maka kepala desa harus mampu untuk berbaur dan mendekati kepada masyarakat, istilah ini dalam falsafah jawa kuno diartikan sebagai *manjing ajur-ajer*. *Manjing ajur-ajer* diartikan sebagai kemampuan untuk berbaur tanpa kehilangan prinsip dan jati diri. Kepala desa diharuskan untuk berbaur dan menyesuaikan diri dengan masyarakat guna mengetahui kebutuhan, permasalahan hingga tindakan solusi yang harus diambil. Maka dari itu kepala desa seringkali blusukan entah kepada pelaku pariwisata, pelaku umkm hingga masyarakat biasa untuk mengetahui apa kebutuhan mereka sehingga mampu untuk menemukan strategi yang tepat.

Kontribusi yang disumbangkan oleh budaya jawa arek dalam penentuan strategi juga tercermin dalam hubungan antara pemerintah desa dengan pemerintah daerah. Ditinjau dari sisi formulasi kebijakan Bottom Up dan Policy Area kepala desa juga melaksanakan lobby politic dengan ciri khas jawa areknya guna pelaksanaan program dan kegiatan. Formulasi kebijakan Bottom Up dan Policy Area seringkali mempengaruhi bagaimana prosesi lobby politic kepala desa kepada pemerintah daerah yang dikenal dengan istilah *Nyenggekek*. Policy Area atau berbicara mengenai kewenangan, banyak kewenangan pembangunan di desa yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Maka dari itu proses lobby politic ini menjadi proses yang krusial. Kepala desa seringkali menggunakan karakteristik budaya yang sesuai dengan ciri budaya Jawa Arek untuk melakukan lobby kepada pemerintah daerah. Kepala desa dikenal dengan sikap blak-blakan bahkan bondho nekat seperti yang dicontohkan dalam pemberian BLTDD pada masa pandemi Covid 19, sehingga pemerintah daerah seringkali memberikan kredit kepada Kepala Desa Hulurejo dengan sikapnya tersebut. Kredit politik yang diberikan kepada kepala desa merupakan hasil *Nyenggekek* yang dilakukan dengan menggunakan konsep kebudayaan.

Pada strategi seorang usahawan politik dalam menjalankan kewirausahaan politik harus mempertimbangkan dua cabang utama. Kewirausahaan politik dibagi terhadap dua cabang utama yakni dalam ekonomi politik dan literatur proses penciptaan kebijakan yang inovatif. Dalam proses ekonomi politik tujuannya adalah untuk merelokasi sumber daya untuk penyediaan barang publik yang efisien, sedangkan dalam literatur kebijakan tujuannya adalah perubahan kebijakan. Analisa dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik kewirausahaan politik yang diimplementasikan oleh Joko menunjukkan bahwa terdapat dua cabang pemikiran utama yang dijelaskan diatas, baik dari sisi ekonomi politik atau perubahan kebijakan.

Dari sisi perubahan kebijakan terlihat dari bagaimana dilema dan problematika penyaluran BLTDD pada mas pandemi covid. Joko yang berusaha untuk menerobos kebijakan pemerintah kota mampu untuk menemukan ruang celah dalam suatu kebijakan guna kesejahteraan masyarakat pada masa pandemi. Dengan demikian pada proses penyaluran BLTDD tersebut menjelaskan bagaimana strategi dalam implementasi kewirausahaan politik mampu untuk menginisiasi perubahan kebijakan.

Implikasi kewirausahaan politik terhadap pengalokasi sumber daya guna terciptanya barang publik tercermin dalam aksi *Nyenggek* yang dilaksanakan oleh Joko. Konsepsi *Nyenggek* yang mengandalkan pada kedekatan dengan pemimpin politik terpilih mampu untuk menghadirkan barang publik yang berguna bagi masyarakat. Diantaranya adalah berbagai bantuan dibidang pariwisata berbasis ecotourism yang sering kali didapatkan oleh Desa Hulurejo. Keberhasilan *Nyenggek* yang dilaksanakan oleh Joko tercermin dalam keberhasilan mendapatkan sokongan dana yang melimpah baik dari pihak ketiga maupun pemerintah daerah. Dengan interaksi yang dilaksanakan berbasis dengan budaya jawa arek mampu untuk memberikan nilai positif terhadap kepemimpinan kepala desa.

Dalam cabang ekonomi politik, relokasi sumber daya yang dihasilkan oleh Joko dalam penyaluran BLTDD juga mendukung idiom ekonomi dari negara-negara barat yakni *No free lunch*. Analisa ini didasarkan pada penuturan salah satu mantan pegawai kecamatan yang menyatakan bahwa BLTDD ini diberikan kepada sanak keluarga dan orang-orang terdekat (Pegawai Kecamatan, Wawancara Pribadi,

Februari 2023). Hal ini mendukung pernyataan dari Petridou terkait dengan asumsinya terkait dengan penguasaha politik adalah individu rasional yang mementingkan dirinya sendiri, memasok barang kolektif dengan imbalan beberapa jenis keuntungan. Dalam konteks ini terkait dengan bagaimana koalisi seorang kepala desa yang menerima imbalan dari proses relokasi kebijakan yang dilaksanakan.

Berdasarkan fenomena penyaluran BLTDD dengan menggunakan karakteristik blak-blakan hingga bondho nekat yang terkandung dalam karakteristik kebudayaan Jawa arek tetap ada istilah mendapatkan imbalan dari proses relokasi kebijakan yang dilaksanakan. Hal ini membuktikan bahwa kepemimpinan yang menghasilkan *feedback* dari masyarakat tetap mengandung imbalan dan beberapa jenis keuntungan politik yang didapatkan.

Tantangan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Kewirausahaan Politik

Dalam pelaksanaannya, implementasi kewirausahaan politik di Desa Hulurejo memiliki beberapa tantangan keberlanjutan di masa depan. Tantangan pertama adalah permasalahan buah apel yang menjadi masalah klasik yang kian sulit untuk diatasi. Resistensi buah apel dalam keberlanjutan ecotourism di Desa Hulurejo menjadi salah satu item utama, Desa Hulurejo yang terkenal dengan wisata petik buah apelnnya harus menjaga keberadaan buah apel sehingga mereka tidak kehilangan identitas mereka dalam sektor pariwisata (Ayu Mufidah Kartika Sari, 2022). Beberapa faktor yang menjadi penghambat bagi buah apel untuk tumbuh dan menghasilkan buah yang baik adalah faktor cuaca yang berubah-ubah dan sulit untuk diprediksi, kelonjakan harga pestisida, hingga penyakit cacar buah yang sampai dengan saat ini belum ditemukan solusinya (Mardi Sampurno, 2023).

Fenomena ini menjadikan banyak petani buah apel di Desa Hulurejo beralih fungsi menuju komoditas lain yang lebih realistis untuk mendapatkan keuntungan. Mereka beralih menuju komoditas lain berupa buah jeruk atau komoditas sayuran (M Bagus Ibrahim, 2023). Kondisi ini dinilai dari sisi keberlanjutan ecotourism memang sedikit mengkhawatirkan. Resistensi dan keberlanjutan pariwisata berbasis pertanian yang digalakkan oleh pemerintah desa mendapatkan ancaman dari produksi buah apel yang dari tahun ke tahun semakin menurun. Selain terancamnya buah apel sebagai salah satu ikon Desa Hulurejo, hal lain yang harus dipikirkan oleh Joko Beres

adalah petani apel yang selama ini menggantungkan hidupnya pada komoditas buah apel. Penurunan pendapatan masyarakat yang diakibatkan oleh beberapa faktor diatas juga harus segera dipikirkan.

Sebagai kepala desa harus mengambil sikap dan tindakan, tetap pada jalan buah apel dengan konsekuensi revitalisasi yang memerlukan biaya, waktu, dan pengorbanan yang tidak sedikit atau beralih membranding Desa Hulurejo yang lebih realistis dan berkelanjutan di masa yang akan datang. Ketika ditanya mengenai apel sebagai branding dari Desa Hulurejo, SP menjelaskan sebagai berikut:

“Kalau memang Desa Hulurejo brandingnya sebagai desa dengan produsen apel saya setuju, tetapi bagaimana dengan nasib kita jikalau terus-terusan rugi akibat buah apel? (Wawancara, SP Petani Lokal, Oktober 2023).

Lebih lanjut Joko juga menjelaskan bahwa selain komoditas apel, Desa Hulurejo sebenarnya juga memiliki perkebunan kopi, tetapi kurang dimaksimalkan oleh petani.

Bak gayung bersambut, pada pertengahan tahun 2023 Gubernur Jawa Timur meresmikan agroforestry dalam bentuk penanaman kopi masal yang melibatkan Desa Hulurejo. Desa Hulurejo sendiri diberikan jatah lahan kopi seluas 500 hektar yang nantinya akan dikerjakan oleh petani hutan (Fizriyani Wilda, 2023). Kontur pegunungan yang ada di Desa Hulurejo dianggap sebagai salah satu tempat terbaik untuk berkembangnya komoditi kopi. Dengan demikian tampak bahwa pembentukan agroforestry baru ini mampu untuk dijadikan solusi tatkala komoditi apel mengalami penurunan produksi. Peluang yang menguntungkan bagi pemerintah desa, tinggal hanya bagaimana mereka menyikapi peluang yang ada.

Tentang agroforestry kopi ini Joko menjelaskan bahwa pemerintah desa siap turut andil dan memberikan bantuan kepada petani hutan. Joko secara terang-terangan akan mensupport petani hutan dalam bentuk peningkatan sumber daya manusia (Malangposcomedia.id, 2023). Beliau menjelaskan bahwa pemerintah desa siap untuk memberikan proses pengelolaan kopi mulai dari penanaman, perawatan, pemanenan, pengolahan, hingga bagaimana branding yang harus mereka lakukan untuk mempromosikan hasil panen.

Tantangan lain yang dihadapi oleh Joko dalam menjalankan kewirausahaan politik adalah permasalahan stunting. Dalam presentase stunting yang dirilis oleh pemerintah Kota X, Desa Hulurejo menjadi desa dengan presentase tinggi diatas angka presentase pemerintah kota. Desa Hulurejo memiliki presentase stunting sebesar 14,51 persen. 74 balita dari total 510 mengalami stunting, angka presentase yang disebutkan diatas merupakan data per bulan agustus 2023 (Dinas Kesehatan Kota X, 2023). Secara tren, Desa Hulurejo mengalami penurunan terkait dengan data stunting dari laporan per Februari hingga laporan per Agustus 2023. Pada laporan per Februari 2023 jumlah prosentase balita stunting di Desa Hulurejo pada angka 16,22 persen. Kemudian pada laporan per Juni 2023 angka tersebut mengalami penurunan pada angka 15,33 persen. Hingga pada laporan per bulan Agustus 2023 dapat ditekan pada angka 14,51 persen. Data presentase tersebut melebihi prosentase kota yang berada di angkat 12,77 persen (Dinas Kesehatan Kota X, 2023).

Menterengnya dan kesuksesan Desa Hulurejo dalam menjalankan ecotourism maupun program pembangunan, sedikit miris apabila meninjau bagaimana angka stunting yang terjadi di tingkat desa. Terlebih tidak adanya inovasi ataupun tindakan nyata dari usahawan politik guna mengatasi permasalahan tersebut.

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan observasi yang dilaksanakan, pemerintah desa hanya menjalankan *mandatory* berupa penyelenggaraan posyandu hingga pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) desa. Dengan demikian Pemerintah Kota X berupaya untuk mengintervensi bagaimana pemenuhan gizi balita stunting dalam bentuk intervensi pemenuhan gizi. Penjabat (PJ) Wali Kota X membentuk tim penanganan stunting sendiri dengan memberi mandat kepada kepala SKPD mengatasi stunting per desa (Richa Irsya, 2023), inovasi ini juga yang menjadi alasan mengapa terjadi penurunan angka stunting di Desa Hulurejo pada laporan per bulan Agustus 2023.

Masalah stunting bukan masalah baru yang harus ditangani, terutama di Kota X masalah stunting adalah permasalahan klasik yang selalu timbul dari tahun ke tahun. Maka dari itu, pemerintah desa seharusnya sudah menyiapkan master plan atau tindakan konkrit guna penanganan masalah stunting. Pemerintah desa hanya bersifat pasif tentang bagaimana inovasi-inovasi mereka dalam penanganan stunting

yang semestinya dilaksanakan. Inovasi yang diimplementasikan oleh Penjabat Wali Kota X juga menjelaskan bahwa tidak adanya inovasi dari masing-masing Desa juga membuat pemerintah kota melakukan intervensi terkait dengan permasalahan yang ada. Fenomena stunting beserta dengan penanganannya di Desa Hulurejo juga menjelaskan bahwa setiap pemimpin politik memiliki celah dalam menjalankan kebijakan yang dibuat. Kasus stunting merupakan salah satu pelayanan dasar yang harus diberikan oleh pemerintah dari berbagai level guna mendukung ketersediaan generasi masa mendatang yang tangguh.

Dengan ide-ide dan gagasan yang Joko manifestasikan dalam pengelolaan ecotourism dan interaksi dengan berbagai aktor, masalah stunting tentunya memerlukan perhatian lebih. Analisis dari penulis, permasalahan stunting bukan merupakan permasalahan yang sulit untuk dikendalikan, tetapi diperlukan keinginan atau *political will* yang kuat dan memadahi sehingga permasalahan ini mampu untuk diselesaikan. Penyelesaian masalah stunting yang ada di Desa Hulurejo akan berdampak kepada angka stunting kota sehingga dapat ditekan. PJ Wali Kota X telah menjalankan perannya sebagai pelaku politik kreatif tingkat kota, tinggal menunggu bagaimana Joko sebagai pengusaha politik ditingkat desa mampu untuk menemukan ruang celah kebijakan untuk menangani permasalahan yang ada.

Bentuk intervensi atau penemuan celah kebijakan oleh pemerintah desa sebenarnya dapat dilaksanakan melalui program-program PKK tingkat desa. Terkait dengan kewenangan, permasalahan stunting memang secara hierarki merupakan wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota. Tetapi terdapat pendelegasian wewenang kepada PKK melalui pemerintah desa, sehingga pemerintah desa dapat melakukan intervensi guna menangani permasalahan yang ada. Pada sub bab ini juga memberikan bukti bahwa kewirausahaan politik yang dijalankan oleh Joko memiliki celah. Hal ini terpampang nyata dalam dokumen alokasi dan realisasi anggaran kegiatan PKK tingkat desa dan kelurahan tahun 2023. Berbeda dengan desa-desa lain yang menganggarkan penambahan gizi, penambahan susu untuk balita stunting, hingga bagaimana penambahan lauk pauk guna membantu untuk mengatasi masalah stunting yang terjadi. Alokasi dan Realisasi anggaran kegiatan PKK Desa Hulurejo hanya kegiatan yang bersifat rutin yang tidak memiliki keberlanjutan. Semisal

pertemuan pokja se kecamatan, pertemuan kader, pertemuan tribina, hingga jambore dan HKG PKK. (Laporan Penjabat Wali Kota X Triwulan III TA. 2023).

Beberapa desa lain di Kota X juga mengalokasikan penanganan stunting dengan kegiatan yang berkelanjutan. Desa Y misalnya, mengalokasikan kegiatan pelatihan pembuatan menu, hingga pencegahan pernikahan dini anak. Tidak berbeda jauh, Desa Z juga mengadakan penyuluhan pencegahan stunting bagi calon pengantin yang bersifat wajib sebagai syarat untuk melangsungkan pernikahan. Desa F bahkan secara berkelanjutan mengadakan kelas stunting dan ibu hamil yang dilaksanakan rutin setiap bulan beserta dengan narasumber yang kompeten. Beberapa contoh diatas digunakan untuk membandingkan bagaimana keseriusan dan *political will* dari seorang pemimpin guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Penjelasan tersebut juga diperkuat dengan alokasi dana desa dan dana desa yang dialokasikan untuk percepatan penurunan stunting. Pada tahun 2023 pihak desa mengalokasikan dana sebesar 181.207.500 juta rupiah untuk kegiatan Posyandu Tematik Stunting (Dinas Kesehatan Kota X). Kegiatan dan alokasi yang dilaksanakan dirasa masih minim dan tidak maksimal. Pemerintah desa harusnya menambahkan kegiatan yang lebih berkelanjutan dan bersifat pencegahan, misalnya kegiatan CFC Stunting, PMT susu ibu hamil, hingga pemeriksaan oleh dokter spesialis anak seperti yang dilakukan oleh desa/kelurahan lainnya.

KESIMPULAN

Temuan penelitian ini memperluas kewirausahaan politik dari aspek how dengan mempertimbangkan kontribusi budaya dalam strategi menjalankan kewirausahaan politik dimana studi ini belum banyak didiskusikan dalam riset akademis. Penelitian ini memberikan gagasan lain dalam pratik strategi kewirausahaan politik yang dikemukakan oleh Petridou (2016) dengan menggunakan identitas kebudayaan. Subkultur Kebudayaan Jawa Arek seperti Manjing Ajur-Ajer, Egalitarian, Blak-Blakan, hingga Bondho Nekat memberikan kontribusi terhadap bagaimana cara pendekatan kepada masyarakat hingga bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh kepala desa kepada pemerintah daerah setempat. Joko menggunakan

karakteristiknya secara tepat dan sesuai pada tempatnya, ia menggunakan karakteristik yang soft kepada masyarakat dan sikap nekat dan blak-blakan kepada pemerintah daerah.

Dengan kesamaan karakteristik budaya antara pemimpin dan masyarakat memberikan kontribusi positif dalam praktik strategi kewirausahaan politik. Sehingga penelitian ini juga memperkuat pernyataan *Backer* yang menyatakan bahwa kebudayaan yang berada ditempat yang salah akan menimbulkan egoisme, berbeda dengan kebudayaan berada ditempat yang tepat akan menimbulkan keselarasan dan keharmonisan. Temuan penelitian ini menjelaskan bagaimana strategi dalam praktik kewirausahaan politik memberikan gagasan baru dalam item how. Praktik kewirausahaan politik dengan mengamalkan nilai-nilai budaya dalam proses interaksi dan strategi usahawan politik berkontribusi kepada tanggapan positif masyarakat tentang kepemimpinan Joko. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa filosofi jawa arek yang diimplementasikan dalam kewirausahaan kepala desa mampu untuk menjadi solusi terkait dengan berbagai permasalahan yang di masyarakat, hal ini didasarkan pada pola komunikasi yang cair dan mampu mengakomodasi seluruh kepentingan masyarakat.

Temuan lain dari penelitian ini adalah bagaimana dua cabang pemikiran kewirausahaan politik yakni ekonomi politik dan perubahan kebijakan terkandung dalam kewirausahaan politik yang diimplementasikan oleh Joko. Penelitian ini juga mendukung idiom *no free lunch* dimana dalam relokasi sumber daya seorang usahawan politik mendapatkan imbalan keuntungan politik dalam penyaluran BLTDD sehingga menguntungkan koalisinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Autar. 2017. "Hibriditas Pertemuan Budaya Jawa Arek." Surabaya: FBS Universitas Negeri Surabaya: 1–11.
- Ansori. 2015. "Aksiologi Nilai Egaliter Budaya 'Arek Suroboyo.'" Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents 3(April): 49–58.

- Björkman, Hans, and Mats Sundgren. 2005. "Political Entrepreneurship in Action Research: Learning from Two Cases." *Journal of Organizational Change Management* 18(5): 399–415.
- Christopoulos, Dimitrios, and Karin Ingold. 2011. "Distinguishing between Political Brokerage & Political Entrepreneurship." *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 10: 36–42. <http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.01.006>.
- Darmalaksana, Wahyudin. 2020. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan." Pre-print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung: 1–6.
- Hariyati, Rr Tutik Sri. 2010. "Mengenal Systematic Review Theory Dan Studi Kasus." *Jurnal Keperawatan Indonesia* 13(2): 124–32.
- Hederer, Christian. 2007. "Political Entrepreneurship and Institutional Change: An Evolutionary Approach." *Munich Personal RePEc Archive* 13(8249): 1–31. <http://mpira.ub.uni-muenchen.de/8249/MPRA>.
- Holcombe, Randall G. 2002. "Political Entrepreneurship and the Democratic Allocation of Economic Resources." *Review of Austrian Economics* 15(2–3): 143–59.
- Imam Sutardjo. 2014. "Konsep Kepemimpinan Hasthabrata Dalam Budaya Jawa." *Jumantara: Jurnal Manuskrip Nusantara* 5, No. 2(2): 85–104. <https://ejournal.perpusnas.go.id/jm/article/view/005002201406>.
- Kirzner, Israel M., and Frederic Sautet. 2006. "The Nature and Role of Entrepreneurship in Markets: Implications for Policy." *Mercatus* (November). <http://papers.ssrn.com/abstract=1264696>.
- Kushandajani. 2016. "Implikasi Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa." *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 2(1): 53–64.
- Leni, Nurhasanah. 2012. "Demokrasi Dan Budaya Politik Lokal Di Jawa Timur Menurut R. Zuhro, Dkk." *TAPIS* 8(1): 69. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1542/1282>.
- Lipsky, M. 2010. *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Service*. Russell Sage Foundation. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=cs_djgS5v-

[UC&oi=fnd&pg=PR3&dq=street+level+bureaucracy&ots=mLqYznFK61&sig=AYOHkkT3h5GQSt-tetZLyS1EeWl.](#)

Malang Times. 2019. "Punya Banyak Potensi, Desa Di Kota X Ini Larang Toko Modern Masuk."

<https://www.malangtimes.com/baca/40080/20190607/135700/punya-banyak-potensi-desa-di-kota-x-ini-larang-toko-modern-masuk>.

Petridou, Evangelia, Inga Narbutaité Aflaki, and Lee Miles. 2015. "Unpacking the Theoretical Boxes of Political Entrepreneurship." *Entrepreneurship in the Polis: Understanding Political Entrepreneurship* (February): 1–16.

Pettinicchio, David. 2013. *36 Research in Social Movements, Conflicts and Change Strategic Action Fields and the Context of Political Entrepreneurship: How Disability Rights Became Part of the Policy Agenda*. Emerald Group Publishing Limited. [http://dx.doi.org/10.1108/S0163786X\(2013\)0000036006](http://dx.doi.org/10.1108/S0163786X(2013)0000036006).

Purba, Jackson Roni. 2015. "Kepemimpinan Sang Walikota : NGAYOMI, NGAYEMI, LAN NGAYAHl." *Diponegoro Journal of Management* 4(4): 342–55.

Radar Malang. 2021. "Siapkan Rp 60 M Untuk Bangun Wisata Kebun Desa Hulurejo, Kota X." <https://radarmalang.jawapos.com/malang-raja/kota-X/04/08/2021/siapkan-rp-60-m-untuk-bangun-wisata-kebun-desa-Hulurejo-kota-X/>.

Setda Kota X, Bagian Pemerintahan. 2016. *Profil Desa Di Kota X*. Bagian Pemerintahan Setda Kota X. Kota X.

Sigurdarson, Hallur Thor. 2021. "Reboot and Repeat: Political Entrepreneurship in the Icelandic Pirate Party." *Ephemera: Theory & Politics in Organization* 21(2): 139–75.
<https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=151850146&site=ehost-live>.

Silander, Daniel. 2016. "1 . European Governance and Political Entrepreneurship in Times of Economic Crisis." : 3–24.

Sobari, Wawan. 2019. "The Practice of Political Entrepreneurship in a Rural Javanese Village." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 23(1): 30–44.

Times Malang. 2022. "Saat Warga Desa Hulurejo Amalkan Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-Hari." <https://malang.times.co.id/news/berita/5iyn5j8900/Saat-Warga-Desa-Hulurejo-Amalkan-Pancasila-Dalam-Kehidupan-Sehari-Hari>.

Xbara, Juliana. 2017. "Paradigma Penelitian Kualitatif Dan Filsafat Ilmu Pengetahuan Dalam Konseling." *Jurnal Fokus Konseling* 3(2): 95.

Yan, Ho Don, and Michael S.H. Heng. 2016. "Political Entrepreneurship and the Ko-P Phenomenon in Taiwan's Democratization*." *Asian Journal of Political Science* 24(3): 285–304. <http://dx.doi.org/10.1080/02185377.2016.1229205>.